

# Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2016-2021 untuk Penanganan Banjir oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Rizqi Setyo Pambudi<sup>1</sup>, Tri Mulyani Sunarharum<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Gadjah Mada and [rizqi.setyo.pambudi@mail.ugm.ac.id](mailto:rizqi.setyo.pambudi@mail.ugm.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Gadjah Mada and [yani.sunarharum@ugm.ac.id](mailto:yani.sunarharum@ugm.ac.id)

---

## ABSTRAK

---

Kabupaten Kendal merupakan daerah di pesisir utara pulau Jawa yang memiliki masalah banjir terutama pada daerah pesisir yang memiliki morfologi datar sampai bergelombang. Berdasarkan data dari BPBD Kab. Kendal, dalam rentang waktu 2014 – 2020 telah terjadi 219 kejadian bencana banjir dengan intensitas kejadian yang meningkat setiap tahunnya. Dampak dari banjir ini menyebabkan genangan pada pemukiman, ratusan hektar tambak dan sawah gagal panen serta kerusakan infrastruktur terutama infrastruktur jalan. Upaya penanggulangan banjir sudah coba dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi akan tetapi data mencatat intensitas kejadian dan dampak bencana semakin meningkat. Oleh karena itu melalui penelitian ini akan dilakukan evaluasi kebijakan pemerintah dalam implementasi program dan kegiatan untuk mengurangi risiko banjir dari tahun 2016-2021. Evaluasi kebijakan menggunakan 3 kriteria parameter gabungan dari William Dunn dan dari Bappenas yaitu: relevansi, efektivitas dan dampak. Hasil analisis mengidentifikasi bahwa dari 11 kegiatan hanya 1 satu kegiatan yang memenuhi 3 kriteria evaluasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal belum tepat sasaran untuk mengurangi risiko banjir yang terjadi.

**Kata Kunci:** *Evaluasi, Kebijakan, Banjir, Kendal.*

## ABSTRACT

---

*Kendal Regency is an area on the north coast of Java Island that experiences flood problems, particularly in coastal areas with flat to wavy terrain. Based on data from BPBD Kab. Kendal, there have been 219 flood events in the period of 2014 to 2020, and the intensity of these events has been increasing every year. These floods have resulted in the inundation of settlements, the failure to harvest hundreds of hectares of ponds and rice fields, and damage to infrastructure, especially road infrastructure. The regional and provincial governments have made efforts to address these floods, but the data shows that the intensity and impact of the disasters are still increasing. Therefore, this research aims to evaluate government policies in implementing programs and activities to reduce flood risk from 2016 to 2021. The policy evaluation will use three combined parameter criteria from William Dunn and Bappenas, relevance, effectiveness, and impact. The analysis results identified that out of the 11 activities, only one activity met all three evaluation criteria. This indicates that the policies implemented by the Kendal Regency government have not effectively reduced the risk of flooding.*

**Keywords:** *Evaluation, Policy, Flood, Kendal.*

---

## PENDAHULUAN

Kabupaten Kendal merupakan daerah di pesisir utara Pulau Jawa dengan morfologi datar di sebelah utara dan di sebelah selatan di dominasi oleh morfologi bergelombang dan berbukit. Terdapat 10 sungai yang 5 di antaranya memiliki debit aliran lebih dari 200 m<sup>3</sup>/s pada saat musim hujan. Berdasarkan kondisi fisik tersebut Kabupaten Kendal memiliki wilayah dengan luas 47.724 Ha berpotensi tinggi terdampak bahaya (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, 2021). Oleh karena itu berdasarkan kajian risiko bencana yang dilakukan pada tahun 2021 memberikan rekomendasi prioritas bencana di Kabupaten Kendal yaitu bencana banjir. Banjir yang terjadi di Kab. Kendal terjadi karena intensitas hujan tinggi sehingga air tidak mampu di

distribusikan akibat dari pendangkalan sungai kemudian menyebabkan banjir air serta kenaikan muka air laut yang juga menyebabkan banjir rob. Dampak dari banjir ini menyebabkan genangan pada pemukiman, ratusan hektar tambak dan sawah gagal panen serta kerusakan infrastruktur terutama infrastruktur jalan.

Upaya penanggulangan banjir sudah diupayakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, akan tetapi tren kejadian banjir semakin meningkat tiap tahunnya. Tercatat data dari BNPB Kabupaten Kendal intensitas kejadian banjir dari tahun 2015 meningkat drastis di tahun 2017 mencapai 3 kali lipat yaitu dari 6 kejadian di tahun 2015 menjadi 30 kejadian di tahun 2017. Sedangkan sampai tahun 2020 intensitas bencana terus meningkat mencapai 2 kali lipat dari tahun 2017. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai tujuan serta tidak efektif dalam mengurangi risiko bencana banjir yang ada. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi apakah program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan efektif dan memberikan dampak terhadap pengurangan risiko banjir di Kabupaten Kendal. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kendal dalam menyusun program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan banjir ke depannya.

## LANDASAN TEORI

### A. Banjir

Banjir merupakan peristiwa atau keadaan terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (BSN, 2015). Banjir juga didefinisikan sebagai ancaman musiman yang diakibatkan meluapnya air dari saluran drainase baik primer maupun sekunder yang kemudian menggenangi wilayah di sekitarnya (IDEP, 2007). Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI mengklasifikasikan jenis-jenis banjir di Indonesia menjadi 5 (lima) jenis yaitu: 1) banjir bandang, 2) banjir air, 3) banjir lumpur, 4) banjir rob dan 5) banjir cileunang.

Menurut (Maryono, 2020) terdapat 5 (lima) penyebab secara umum banjir yang terjadi di Indonesia yaitu faktor hujan, faktor rusaknya daerah aliran sungai (DAS), faktor kesalahan perencanaan pembangunan, faktor sedimentasi sungai serta faktor kesalahan tata ruang dan pembangunan infrastruktur. Selain itu masih banyak faktor lainnya tergantung karakteristik fisik, sosial maupun karakteristik khusus suatu wilayah.

### B. Manajemen Banjir

Manajemen bencana adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana meliputi kegiatan pra bencana, saat bencana dan pascabencana (Ulum, 2013). Menurut (Kodoatie, 2013) menjelaskan dengan lebih detail terkait manajemen bencana banjir adalah sebuah bagian dari pengelolaan sumberdaya air yang bertujuan untuk mengontrol banjir menggunakan infrastruktur tertentu dan pencegahan banjir dengan melakukan pengelolaan tata guna lahan. Tujuan utama dari manajemen bencana adalah untuk mengurangi risiko pada manusia, mencegah korban jiwa, memberikan informasi risiko bencana, mengurangi kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi serta dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan untuk mengurangi risiko banjir (Ulum, 2013).

Secara umum tahapan manajemen banjir di Indonesia terbagi menjadi 3 tahapan yaitu: kegiatan sebelum banjir meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan, kegiatan saat terjadi banjir yaitu kegiatan tanggap darurat dan kegiatan setelah terjadi banjir yaitu tahap pemulihan. Sedangkan

untuk pengendalian banjir (Kodoatie, 2013) membaginya menjadi 2 jenis yaitu pengendalian banjir berdasarkan lokasi dan pengendalian banjir berdasarkan teknis penanganan. Pengendalian banjir berdasarkan lokasi dibagi menjadi 2 yaitu pengendalian banjir di kawasan hulu dan pengendalian banjir di kawasan hilir. Sedangkan pengendalian banjir berdasarkan teknis penanganannya dibagi menjadi pengendalian banjir metode struktural dengan cara pembangunan sarana fisik dan pembuatan rekayasa sungai serta pengendalian banjir metode non struktural dengan melakukan serangkaian tindakan non fisik melalui kebijakan, peringatan maupun bantuan teknologi untuk mengurangi risiko bencana (Heliani et al., 2021).

### C. Evaluasi Kebijakan Publik

(Sari, 2017) mendefinisikan kebijakan publik adalah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu wilayah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (William, 2003) membagi tahapan dalam penyusunan kebijakan publik yaitu: perumusan masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Salah satu tahapan dalam rangkaian penyusunan kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil dan dampak dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah terutama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal (Lesmana et al., 2020).

Evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu kebijakan, program atau kegiatan berdasarkan analisis relevansi, keefektifan, biaya dan keberhasilannya (Bappenas, 2009). Menurut (William, 2003) terdapat 6 kriteria dalam melakukan evaluasi kebijakan yaitu kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Sedangkan Bappenas membagi evaluasi dalam beberapa parameter kriteria yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, hasil, dampak serta keberlanjutan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deduktif kualitatif dimana peneliti melakukan observasi mendalam terkait program dan kegiatan serta segala hal yang berhubungan dengan kebijakan pengurangan risiko banjir di Kabupaten Kendal. Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kendal tahun 2016-2021, dokumen Rencana Strategis (Renstra) dinas terkait dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas terkait dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Selain itu dilakukan wawancara mendalam dengan masyarakat dan *key person* di tataran kelurahan untuk melihat implementasi program, dan kegiatan yang diimplementasikan pemerintah. Data-data tersebut dianalisis secara komprehensif dan disajikan dalam bentuk analisis kualitatif naratif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kendal dengan batasan temporal antara tahun 2016-2021 terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko banjir di Kabupaten Kendal.

Kriteria evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggabungkan antara kriteria dari (William, 2003) dan kriteria yang ditetapkan oleh (Bappenas, 2009) sebagai berikut.

**Tabel 1.** Kriteria dan Variabel Penelitian

Kriteria Evaluasi	Variabel	Indikator
Relevansi	- Kesesuaian program dengan tujuan;	- Program dan kegiatan sesuai dengan tujuan pengurangan risiko bencana;

	- Sinkronisasi program dengan RPJMD.	- Program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD
Efektivitas	- Ketercapaian program; - Kontribusi program dalam mencapai tujuan	- Program dan kegiatan diimplementasikan sesuai dengan target RPJMD; - Program dan kegiatan mempunyai kontribusi dalam mencapai tujuan.
Dampak	- Dampak program terhadap masyarakat secara langsung	- Masyarakat merasakan secara langsung dampak dari program dan kegiatan yang diimplementasikan

Sumber: Analisis Peneliti

**A. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan 2 metode yang berbeda, untuk wawancara dengan pemangku kepentingan menggunakan metode *snowball sampling*, sedangkan untuk wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa dilakukan dengan metode random sampling. Untuk narasumber dari pemangku kepentingan dipilih adalah staf perencanaan atau pejabat struktural atau staf yang menangani program dan kegiatan yang terkait penanganan banjir. Sedangkan untuk narasumber warga dan perangkat desa dipilih secara acak dengan pertimbangan bahwa narasumber sudah menetap di daerah rawan banjir selama 5 tahun terakhir dan terdampak banjir. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengunduh dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersedia pada laman Dinas terkait.

**B. Metode Analisa Data**

Analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif analitik berdasarkan dari data empirik yang ada disertai verifikasi menggunakan wawancara dianalisis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi menggunakan 3 kriteria yaitu relevansi, efektivitas dan dampak bertujuan untuk melihat program dan kegiatan eksisting tentang pengurangan risiko banjir di Kabupaten Kendal apakah sudah sesuai dengan tujuan, berjalan secara efektif serta menghasilkan dampak yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak. Semakin efektif dan semakin memberikan dampak positif dapat memberikan indikasi bahwa program dan kegiatan yang sudah dilakukan selama ini berhasil untuk mengurangi risiko bencana banjir.

Program penanggulangan banjir sudah coba dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kab. Kendal melalui 8 program dan 11 kegiatan yang dapat dilihat pada **tabel 2**. Program dan kegiatan pengurangan risiko banjir dilaksanakan oleh beberapa Dinas terkait di antaranya: 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kendal melalui 2 program dan 7 kegiatan dengan anggaran pada tahun 2016-2021 mencapai 8 milyar, 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kendal melalui 6 program dan 9 kegiatan dengan anggaran pada tahun 2016-2021 mencapai 56 milyar, dan 3) Balai Besar Wilayah Sungai Bodri Kuto mencapai 25 milyar masa anggaran 5 tahun

untuk penanganan banjir di wilayah kewenangannya. Data tersebut diambil dari dokumen RPJMD Kab. Kendal tahun 2016-2021 dan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DINAS PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Dalam perjalanannya terutama implementasi RPJMD Kab. Kendal tahun 2016-2021 mengalami banyak hambatan terutama akibat *refocusing* anggaran untuk pandemi Covid-19 pada tahun 2019 sehingga banyak program dan kegiatan untuk penanganan banjir tidak dapat berjalan optimal.

Program dan kegiatan dievaluasi dengan menggunakan 3 kriteria evaluasi yaitu relevansi, efektivitas dan dampak. Relevansi dilakukan dengan membandingkan dokumen Renstra dengan dokumen RPJMD untuk melihat keterkaitan program dan kegiatan dengan tujuan. Efektivitas dilakukan dengan membandingkan dokumen Renstra dengan laporan LKjIP dan hasil wawancara Dinas terkait untuk validasi. Sedangkan dampak dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap warga dan perangkat desa. Hasil dari evaluasi program dan kegiatan pengurangan risiko banjir di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada **tabel 2** dibawah.

**Tabel 2.** Identifikasi Program dan Kegiatan untuk Mengurangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Kendal

Program	Kegiatan	Fokus	Relevansi	Efektivitas	Dampak
1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	1. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kesiapsiagaan	Relevan	Kurang efektif	Kurang berdampak
	2. Gladi manajemen bencana	Kesiapsiagaan	Relevan	Kurang efektif	Kurang berdampak
2. Program Pengembangan Data dan Informasi	3. Rencana kontijensi menghadapi bencana	Kesiapsiagaan	Relevan	Kurang efektif	Kurang berdampak
3. Program Pembangunan Saluran Drainase	4. Pembangunan saluran drainase	Pencegahan dan Mitigasi	Relevan	Kurang efektif	Kurang berdampak
4. Program Pembangunan turap/talud/bronjong	5. Pembangunan turap/talud/bronjong	Pencegahan dan Mitigasi	Relevan	Kurang efektif	Kurang berdampak
5. Program Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan SDA lainnya	6. Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau	Pencegahan dan Mitigasi	Relevan	Kurang efektif	Kurang berdampak
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	7. Pembangunan sarana prasarana air limbah/sanitasi	Pencegahan dan Mitigasi	Relevan	Kurang efektif	Kurang berdampak
	8. Peningkatan pembersihan dan	Pencegahan dan Mitigasi	Relevan	Tidak efektif	Tidak berdampak

7. Program Pengendalian Banjir	pengerukan sungai/kali				
	9. Rehabilitasi infrastruktur di bantaran dan tanggul sungai	Pencegahan dan Mitigasi	Relevan	Efektif	Berdampak
	10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	Pencegahan dan Mitigasi	Relevan	Kurang efektif	Kurang berdampak
8. Program Pengelolaan Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir	11. Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai dan pantai	Pencegahan dan Mitigasi	Relevan	Kurang efektif	Kurang berdampak

Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh kesimpulan bahwa dari 11 kegiatan pengurangan risiko banjir di Kabupaten Kendal hanya 1 kegiatan yang memenuhi 3 kriteria yaitu kegiatan rehabilitasi infrastruktur di bantaran dan tanggul sungai. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembangunan tanggul sungai untuk mencegah meluapnya air sungai dari badan sungai. Hasil tersebut juga diperkuat dari pernyataan pejabat Kelurahan Bandengan yang wilayahnya paling rawan terhadap bencana banjir, yang mengatakan bahwa:

*“... dengan adanya tanggul sungai yang dibangun oleh Dinas PUPR Kab. Kendal tinggi genangan banjir berkurang cukup drastis. Sebelum ada tanggul sungai daerah timur sungai di wilayah bandengan selalu tergenang apabila ada hujan kiriman dari daerah hulu, ditambah banjir rob sehingga air kiriman tidak bisa langsung mengalir ke laut. Apabila ada tanggul yang jebol kita melaporkan ke Dinas PUPR untuk perbaikan tanggul dan bisa langsung diatasi”* (Sutarjo – Lurah Kelurahan Bandengan, hasil wawancara 26 Januari 2023).

Selain itu terdapat 2 kegiatan yang tidak dapat berjalan secara optimal yaitu kegiatan peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali di Dinas PUPR Kabupaten Kendal dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai dan pantai di Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan adanya masalah kewenangan, Dinas PUPR Kabupaten Kendal tidak bisa melaksanakan kegiatan pengerukan sungai karena sungai Kendal merupakan wewenang Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Dinas Pusdataru tidak dapat melakukan normalisasi dengan optimal karena keterbatasan dana. Berdasarkan hasil wawancara terhadap perangkat desa dan staf Dinas Pusdataru tahun 2022 pengerukan sungai hanya bisa dilakukan sepanjang 750 m dari total panjang sungai Kendal yang mencapai 15,08 km. Sementara itu berdasarkan hasil evaluasi kegiatan lainnya tidak berjalan efektif dan kurang memberikan dampak terhadap pengurangan risiko banjir di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dikarenakan karena kegiatan lainnya hanya dilakukan pada lokasi prioritas saja ataupun pelaksanaannya intensitasnya terbatas karena keterbatasan dana.

Hasil wawancara dan kajian literatur yang ada dapat disimpulkan ada 3 faktor penyebab banjir di Kabupaten Kendal yaitu: 1) pendangkalan sungai, 2) perubahan guna lahan di sempadan sungai, 3) banjir rob pesisir. Berdasarkan faktor penyebab banjir tersebut dihubungkan dengan

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi risiko banjir diperoleh hasil yang ditunjukkan pada tabel 3 dibawah ini.

**Tabel 3.** Analisis hubungan penyebab banjir dan implementasi kegiatan pengurangan risiko banjir di Kabupaten Kendal

Faktor Penyebab Banjir	Implementasi Kegiatan	Permasalahan
Pendangkalan sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali;</li> <li>- Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sungai dan pantai balai PSDA Bodri Kuto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya overlap kewenangan antara Dinas PUPR dan Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
Perubahan guna lahan di sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pengawasan pada daerah sempadan sungai</li> </ul>
Banjir rob		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada kegiatan khusus untuk mengurangi dampak banjir rob pesisir, saat ini hanya ada kegiatan dari pemerintah pusat yaitu program "Kotaku" tetapi hanya pada lokasi tertentu</li> </ul>

Sumber: Analisis Peneliti

Tabel 2 dan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Kendal untuk mengurangi risiko banjir kurang efektif, kurang berdampak dan tidak tepat sasaran untuk mengatasi masalah banjir.

## KESIMPULAN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan kurang efektif, kurang berdampak dan tidak tepat sasaran untuk mengurangi risiko banjir di Kabupaten Kendal. Dari 11 kegiatan hanya 1 kegiatan yang memenuhi kriteria evaluasi, hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara Dinas yang bersangkutan, kekurangan dana dan implementasi kegiatan yang terbatas pada lokasi tertentu sehingga mengakibatkan pencapaian tujuan tidak tercapai secara optimal.

## REFERENSI

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal. (2021). *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal*. <https://bpbd.kendalkab.go.id/>
- Heliani, H., Mareta, F., Rina, E., Rahayu, M. S., & Ramdaniansyah, M. R. (2021). Liquidity, Profitability and Asset Growth towards the Dividend Payout Ratio. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(2), 225–232. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i2.6324>
- IDEP, Y. (2007). Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. *Ubud: Yayasan IDEP*.
- Kodoatie, R. J. (2013). *Rekayasa dan Manajemen Banjir*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Lesmana, T., Iskandar, Y., & Heliani, H. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai

- Perusahaan Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 25–34. <https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1161>
- Maryono, A. (2020). *Menangani banjir, kekeringan dan lingkungan*. UGM PRESS.
- Nasional, B. P. P. (2009). Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor. *Jakarta (ID): BAPPENAS*.
- Nasional, B. S. (2015). Metode pemetaan rawan banjir skala 1: 50000 dan 1: 25000. *SNI*, 8197, 2015.
- Sari, Z. (2017). Evaluasi Efektifitas Implementasi Program Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat. C001–C004. <https://doi.org/10.32315/Ti>, 6, c001.
- Ulum, M. C. (2013). Governance dan capacity building dalam manajemen bencana banjir di Indonesia. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 4(2), 69–76.
- William, D. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.